

# MEMUPUK KEUNGGULAN MADRASAH IBTIDAIYAH

Mohamad Ali\*

## Abstrak

*Umat Islam semakin yakin bahwa model pendidikan Islam ideal adalah yang mampu mengasah kecerdasan pikiran sekaligus kesalehan spiritual. Yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern plus ilmu agama Islam yang memadai. Pada tingkat elementer pekerjaan itu bisa dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah (MI), namun pada kenyataannya MI belum mampu mengemban tugas tersebut sehingga umat kemudian melirik SD Islam elit. Kepeloporan/keunggulan MI bisa muncul kembali bila dipupuk dengan tenaga pendidik profesional kompeten, penguatan jejaring madrasah, dan optimalisasi yayasan atau organisasi keagamaan yang menjadi payung MI.*

**Kata Kunci:** Inovasi Pendidikan, Keunggulan MI.

## A. Pendahuluan

Ketika menatap panorama pendidikan Indonesia kontemporer, tidak sedikit penyelenggara dan pengelola pendidikan madrasah dibuat terhenyak. Bagaimana tidak terhenyak, ketika madrasah yang dikatakan sekolah umum plus berciri khas agama Islam mengalami kelesuan, pada saat bersamaan justru bermunculan dan menjamur sekolah Islam elit/unggul yang memperoleh mandat penuh dari umat<sup>1</sup>. Padahal dari sisi kelembagaan ataupun

---

\* Mahasiswa S2 Pendidikan Dasar UNY, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah PK Kottabarat, Solo.

<sup>1</sup> Setelah mencermati gerak dan kiprah sekolah Islam elit/unggul, Azyumardi Azra berani menelorkan tesis bahwa kemunculan dan menggejalanya sekolah Islam unggul merupakan sebuah model santrinisasi gaya baru di Indonesia. Santrinisasi dalam pengertian membuat umat Islam semakin memahami agamanya dan menjalankan kehidupan sehari-hari sebagaimana yang dianjurkan ajaran Islam. Di masa lalu, pengajian al-Quran dan pesantren yang memainkan peranan penting dalam usaha itu. Lihat Azyumardi Azra, "The Rise of Muslim Elite Schools: A New Patern of Santrinization in Indoensia", *Al-Jamiah Journal of*

kurikulumnya sekolah Islam unggulan itu hampir tidak ada bedanya dengan madrasah<sup>2</sup>. Kalaupun terdapat titik perbedaan itu lebih terletak pada tata kelola sekolah dan kualitas guru. Majalah Triwulan *Madinah* memberi kesaksian berikut ini:

Dalam satu dekade terakhir ini, ledakan sekolah-sekolah Islam memang sangat terasa... Kini, keragaman itu diperkaya dengan sekolah-sekolah yang berlabel Islam dengan kemasan yang jauh lebih modern. Salah satu cirri utamanya adalah, mirip dengan madrasah, kurikulum sekolah-sekolah Islam ini memuat pelajaran agama yang jauh lebih banyak<sup>3</sup>.

Merujuk pada fenomena tersebut, pada hakikatnya model pendidikan madrasah masih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang ditandai percepatan perkembangan ilmu dan teknologi, namun tetap dibayangi dengan ketidakpastian masa depan. Kalau demikian faktanya, pasti ada sesuatu yang belum pas atau masih mengganjal terkait dengan pengelolaan madrasah. Pertanyaan yang tersisa adalah, mengapa potensi keunggulan madrasah yang demikian besar itu belum mampu diejawantahkan dan diaktualisasikan dalam konteks pendidikan Indonesia kontemporer?

Artikel ini berusaha menelusuri dan mengurai benang kusut permasalahan tersebut melalui jendela Madrasah Ibtidaiyah (MI). Pilihan ini dilandasi kenyataan bahwa kajian tentang MI cenderung diabaikan dalam perbincangan tentang madrasah, padahal secara kuantitas jumlahnya sangat besar dibandingkan dengan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah

---

*Islamic Studies* (No.64/XII/1999) hal. 63-78. Untuk melihat kemunculan dan perkembangan lembaga pendidikan Islam model baru ini dapat dibaca kumpulan hasil riset suntingan Jajat Burhanudin & Dina Afrianti, *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indoensia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2006). Di lingkungan pendidikan Muhammadiyah juga muncul geliat untuk memperbaiki kualitas pendidikannya sehingga muncul SD Muhammadiyah Sapen dan SD Muhammadiyah Condongcatur di Yogyakarta. Di Wilayah Surakarta muncul SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Solo, SD Birul Walidain Muhammadiyah Sragen, SD Al-Kautsar Muhammadiyah Gompang Kartasura Sukoharjo dan lain-lain. Uraian selengkapnya tentang kebangkitan SD Muhammadiyah silahkan baca karya Mohamad Ali, *Menabur Benih Sekolah Unggul di Muhammadiyah*. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009).

<sup>2</sup> Kurikulum di Sekolah Dasar Islam Unggulan (SDIU) sama persis dengan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah. Materi umumnya jelas sama, materi agama di SDIU juga mengajarkan Aqidah, Akhlak, Al-Quran, Hadits, Fikih/Ibadah, Tarikh/Sejarah Islam. Bahkan di SDIU masih ditambah hafalan Juz Amma dan proses pembiasaan dalam beragama. Titik perbedaannya adalah, kalau MI dinaungi Depag sedangkan SDIU dinaungi Diknas.

<sup>3</sup> Majalah Triwulan *Madinah* (No. 07/I/Julii 2008) hal. 7

(MA). Secara akademik gejala serupa juga muncul, dimana keberadaan Fakultas Tarbiyah di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) ditujukan untuk mempersiapkan calon guru agama di MTs dan MA. Baru beberapa tahun ini terlihat usaha serius untuk menangani potensi MI, yaitu dengan dibukanya jurusan PGMI di PTAI. Tetapi sejauh ini belum muncul karya yang secara serius mengkaji persoalan tersebut<sup>4</sup>.

Kecenderungan untuk mengabaikan MI amat jelas ketika para peneliti mencoba menjelaskan proses transformasi pendidikan Islam di Indonesia<sup>5</sup>. Pola umum perubahan kelembagaan pendidikan selalu dilukiskan dimulai dari pesantren, madrasah, dan sekolah. Pola umum perubahan kelembagaan itu mungkin tepat untuk melukiskan perkembangan pendidikan Islam untuk tingkat menengah dan Perguruan Tinggi, tetapi tidak cukup akurat untuk memotret lembaga pendidikan Islam tingkat elementer/dasar. Kelahiran dan proses pertumbuhan MI pada umumnya bermula dari penyelenggaraan pendidikan yang bersifat elementer yang berupa Pengajian Quran, Sekolah Arab, atau *Nggon Ngaji* yang banyak tersebar di masyarakat komunitas santri. Oleh karena itu perlu pelacakan serius dan tersendiri berkaitan asal usul dan evolusi MI dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia.

Salah satu alasan mengapa derap langkah madrasah tidak sekencang laju perkembangan sekolah umum, menurut pengamatan penulis, karena beban ideologis dan psikologis masih bersemayam pada diri sebagian intelektual muslim yang berimbas pada sikap ambivalen para praktisi pendidikan madrasah. Beban ideologis<sup>6</sup> terkait penolakan terhadap ilmu umum yang

---

<sup>4</sup> Sedikitnya ada dua karya penting yang secara khusus mengkaji tentang pendidikan Islam model madrasah, yaitu Maksum, *Madrasah Sejarah & Perkembangannya* (Jakarta: Logos, 1999) dan A. Malik Fadjar, *Madrasah dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1998). Namun harus dicatat bahwa uraian tentang Madrasah Ibtidaiyah hanya ditinjau secara sepintas saja.

<sup>5</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1994).

<sup>6</sup> Abdul Munir Mul Khan menyebutnya dengan istilah “ideologi ilmiah”. Dunia pemikiran Islam dihindangi semacam kekeliruan semantik dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang tampil dalam bentuknya yang paling jelas melalui modernisasi sistem pendidikan... sebagian besar dunia Islam mengembangkan “ideology ilmiah” dengan menempatkan seluruh khasanah pemikiran Barat dan Yunani sebagai kebatilan. Kecenderungan demikian disebut “ideology ilmiah” karena dunia pemikiran Islam berusaha membangun suatu epistemologi eksklusif yang unik. Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. (Yogyakarta: SIPRESS, 1993) hal. 2.

dianggap sekuler karena merupakan produk Peradaban Barat. Beban ideologis ini melecutkan wacana dan perdebatan islamisasi ilmu yang menguras tenaga dan sangat melelahkan, tetapi anehnya masih terus berlanjut hingga detik ini. Beban psikologis mengejantah dalam bentuk perasaan rendah diri, lembaga pendidikan kelas dua, ketakutan menghilangnya watak keislaman madrasah, dan kekhawatiran semakin menciutnya peran Departemen Agama dalam pengelolaan madrasah<sup>7</sup>. Alangkah anggunnya apabila beban ideologis dan psikologis itu dapat dikeluarkan dari pikiran dan hati para pemikir dan praktisi pendidikan Islam (madrasah) sehingga mereka dapat bergerak dan melaju dengan kecepatan berlipat. Hanya dengan kelajuan dan kecepatan tinggi itulah madrasah dapat bersaing dan berdiri sama tinggi dengan lembaga pendidikan lain.

Selanjutnya, secara berturut-turut akan dielaborasi proses evolusi pendidikan Islam elementer, menuju MI unggulan, pantulan pengalaman dari kancan dan kontribusi PGMI dalam usaha mendongkrak kualitas MI, serta diakhiri dengan refleksi.

## B. Evolusi Pendidikan Islam Elementer

Pengajian al-Quran, sekolah al-Quran, pendidikan langgar, *nggon ngaji* atau nama lain sesuai daerahnya adalah pendidikan Islam tertua di Indonesia, setua kehadiran Islam. Hal ini mudah dipahami, sebab para pemeluk Islam tidak cukup hanya mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi juga dituntut untuk memenuhi dan melakukan kewajiban agama seperti bersuci, shalat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Pengetahuan dasar keislaman yang bersifat praktis itu dapat diperoleh secara mudah dengan cara belajar di tempat pendidikan Islam elementer ini.

Sampai akhir abad ke-19, pengajian al-Quran adalah satu-satunya model pendidikan Islam elementer yang tersebar luas di hampir seluruh pelosok Indonesia<sup>8</sup>. Bagi anak-anak yang orang tuanya mampu atau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kyai, merasa belum cukup dengan hanya

---

<sup>7</sup> Terkait beban psikologis, baca tulisan Zamakhsyari Dhofier, "Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Pendidikan Nasional" dalam *Majalah Prisma*. No. 9/XII/September 2003 hal. 13-20; Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: LKiS, 2004) hal. 265-281; Marwan Saridjo, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. (Jakarta: Departemen Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1996) hal. 97-174.

<sup>8</sup> Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1984) hal. 158-159.

mengenyam pendidikan tingkat dasar. Mereka akan segera melanjutkan ke pendidikan Islam lanjutan, yaitu pondok pesantren. Ini sejalan dengan sinyalemen Peacock, bahwa pertumbuhan ke arah kedewasaan di kalangan anak laki-laki Muslim di Asia Tenggara mengikuti gerak sentrifugal: dari pengasuhan pihak wanita ke pendampingan pihak pria, dari lingkungan rumah tangga ke lingkungan masyarakat, dari lingkungan bermain-main ke lingkungan ke-Islaman<sup>9</sup>. Mereka mulai belajar doktrin Islam dan belajar membaca al-Quran dengan orang tuanya atau di Langgar, melanjutkan ke pesantren, pergi haji, dan berkiprah di masyarakat.

Memasuki permulaan abad ke-20 mulai muncul gagasan dan prakarsa pembaharuan untuk memperbaiki dan lebih mengefektifkan model pengajian al-Quran. Formulasi pembaruannya diwujudkan dalam bentuk atau model madrasah, ada yang menyebut Sekolah Arab<sup>10</sup> Di situ mulai dipergunakan penjenjangan, papan tulis, dinklik, waktu belajarnya sore hari (antara jam

---

<sup>9</sup> James L. Peacock, *Pembaharu dan Pembaharuan Agama*. Terjemahan M. Ali Widjaya (Yogyakarta: Hanindita, 1983) hal. 17.

<sup>10</sup> Di Jawa Tengah, daerah banyumas, lembaga itu dikenal dengan nama Sekolah Arab. Saifuddin Zuhri menuturkan: “di kampungku biar telah ada 3-4 madrasah, atau tepatnya Sekolah Arab, tapi satupun tidak ada yang diberi nama. Cukup disebut saja Sekolah Arab Karangbangkang atau Sekolah Arab Kebonkapol. Artinya Sekolah Arab yang terletak di kampung Karangbangkang ataupun di kampung di Kebonkapol”. Saifuddin Zuhri, *Guruku orang-orang dari Pesantren*. (Yogyakarta: LKiS, 2007) hal. 2-3.

Penulis sendiri kebetulan hidup di lingkungan santri, kampung putihan: Dagan, Wanadadi, Banjarnegara, yang memiliki pengalaman bagaimana belajar di Sekolah Arab. Pagi hingga siang hari mengenyam pendidikan formal di SD Negeri yang berjarak 1 KM dari rumah. Selepas itu, sore hari jam 14.00 WIB – 16.00WIB belajar di Sekolah Arab berada di sebelah Barat persis rumahku, diselingi istirahat Shalat Ashar di Masjid yang tempatnya berdekatan. Rampung Sekolah Arab bermain dengan teman-teman. Selepas Maghrib sampai tiba shalat Isya belajar membaca al-Quran dan pokok-pokok ajaran Islam di rumah guru ngaji, rumahku menjadi salah satu tempat nggon ngaji dan Bapak menjadi gurunya. Sebelum memasuki al-Quran anak-anak diharuskan belajar membaca Turutan. Belajar di sini dianggap tamat bila sudah mengkhatamkan Al-Quran 30 Juz. Acara Khataman sangat ditunggu-tunggu, sebab yang khataman membawa ingkung (ayam yang dimasak masih utuh) yang dibagikan kepada teman-teman pengajian.

Kembali ke Sekolah Arab. Di sini materinya semua agama: menulis huruf Arab, Bahasa Arab, Aqidah, Akhlah, Tarikh, Hadits. Tidak ada prosesi wisuda atau tamatan sebagaimana pengajian al-Quran. Ketika memasuki SMP tidak bisa lagi belajar di Sekolah Arab karena jaraknya jauh sekitar 2,5 KM dan pulangny sudah sore hari. Saat saya duduk di kelas 2 SMP (1980-an) di tempat Sekolah Arab dirintis Madrasah Ibtidaiyah Cokroaminoto, sore hari masih tetap digunakan untuk Sekolah Arab, tapi belakangan nama berubah menjadi Taman Pendidikan al-Quran (TPA).

14.00 WIB – 16.00 WIB) dan geduang sebagai sarana pendidikan. Dengan demikian, sebagian pengajian al-Quran, pendidikan Langgar, dan *nggon ngaji* berubah dan berevolusi menjadi madrasah atau Sekolah Arab. Mengapa dikatakan sebagian? Karena memang tidak semua pengajian al-Quran dapat berubah menjadi madrasah. Diperlukan kondisi tertentu untuk bisa melahirkan madrasah: ada pengajar yang cukup memadai, daya dukung masyarakat, dan fasilitas tanah untuk gedung. Madrasah kemudian menjadi magnet yang mampu menarik anak-anak muslim dari kampung lain untuk mendatanginya.

Ketika pemerintah Orda Baru menggencarkan program Wajib Belajar, tuntas pendidikan dasar, pada dekade 1970-an umat Islam terpanggil untuk ikut mensukseskan program tersebut dengan jalan mengubah madrasah (diniyah) atau Sekolah Arab menjadi pendidikan formal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah (MI). Waktu belajarnya pagi hari sebagaimana Sekolah Dasar pada umumnya, tapi porsi materi agama jauh lebih banyak dibandingkan SD. Perubahan itu tidak membuat madrasah sore hari berhenti. Ia masih tetap bertahan, bahkan sampai saat ini, dinamakan Madrasah Diniyah. Untuk memperjelas proses evolusi pendidikan Islam elementar, mari kita ikuti deskripsi dan penilaian Zamakhsyari Dhofier di bawah ini:

Meski sebagian besar ulama menerima perubahan nama sekolah (pengajian-*pen*) al-Quran, yang jelas mereka tidak banyak yang memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sekolah al-Quran yang masih “tegar” ini diberi nama baru: madrasah diniyah. Dalam perkembangannya, setelah guru mata pelajaran umum cukup tersedia banyak Madrasah Diniyah diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas dan fluiditas struktural di Indonesia antara (pengajian al-Quran-*pen*), Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar<sup>11</sup>.

Bertalian uraian di muka, proses evolusi pendidikan Islam elementer menjadi lebih terang dan jelas: dimulai dari penyelenggaraan pengajian al-Quran, sebagian tumbuh menjadi Madrasah Diniyah, dan berkembang menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Perlu ditambahkan di sini bahwa, sejak awal keberadaannya di Indonesia pendidikan Islam sejatinya menjadi milik dan menyatu dengan denyut nadi masyarakat, bukan kepunyaan pemerintah. Namun, dalam perkembangannya pemerintah melalui tangan Departemen Agama juga merasa terpanggil untuk ikut mendirikan lembaga-lembaga

---

<sup>11</sup> Zamakhsyari Dhofier, “Sekolah Al-Quran dan Pendidikan Islam di Indonesia” dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*. Vol. III/ No. 4/1992.

pendidikan Islam dalam bentuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Madrasah Aliyah Negeri (MAN), dan UIN/IAIN/STAIN di tingkat perguruan tinggi. Meskipun demikian jumlah MI swasta masih jauh lebih besar dibandingkan dengan kepunyaan pemerintah. Jumlah MIN: 1.025, sedangkan MI swasta: 23.625. Perbandingannya MIN dan MI swasta adalah 4,8% berbanding 95,2%<sup>12</sup>.

Proses evolusi dan keterbukaan madrasah dalam berinteraksi dengan kemajuan dunia luar telah mendorong ke arah hubungan yang semakin mesra. Meskipun usaha-usaha untuk mengintegrasikan pendidikan Islam telah dimulai sejak awal abad ke-20, tetapi baru memperoleh wujud kongkritnya dalam waktu belakangan ini. Di mulai dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Keputusan Bersama itu menegaskan bahwa MI setingkat dengan SD, MTs setingkat dengan SMP, dan MA setingkat dengan SMA. Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama tersebut adalah “lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30% disamping mata pelajaran umum 70%”.

Posisi madrasah dan perguruan agama semakin mantap terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional seiring hadirnya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional<sup>13</sup>. Dalam pasal 11 ayat (6) ditegaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang agama yang bersangkutan. Dari situ diketahui bahwa madrasah telah memiliki posisi yang kokoh dan sejajar dengan lembaga pendidikan lain dalam alam pendidikan nasional. Posisi madrasah bertambah kuat dengan lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 15 menandakan bahwa: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, *keagamaan* dan

---

<sup>12</sup> Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001) hal. 109.

<sup>13</sup> Perjuangan umat Islam dalam usaha merevisi Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 sangat berliku, sebelum akhirnya dapat mengakomodasi keinginan umat Islam agar bersedia mendudukan pendidikan keagamaan (madrasah) dalam alam pendidikan nasional. Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. (Leiden-Jakarta: INIS, 2004).

khusus”.

Berlandaskan pada penjelasan perundang-undangan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa kedudukan dan posisi madrasah secara politik sebenarnya sudah sangat kuat. Madrasah telah menjadi bagian integral yang menyatu padu dalam alam pendidikan nasional. Satu abad yang lalu hal itu masih merupakan mimpi dan sebatas cita-cita umat Islam, sekarang telah menjadi sebuah kenyataan. Oleh karena itu, tidak ada kata lain bagi umat Islam, kecuali mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan materi untuk memajukan madrasah. Madrasah Ibtidaiyah perlu mendapat perhatian ekstra keras, karena di samping jumlahnya sangat besar dan berada di pelosok pedesaan, lebih dari itu adalah tempat awal penggodokan dasar-dasar keilmuan dan pembentukan watak anak bangsa yang sangat berpengaruh bagi masa depan anak bersangkutan dan kemajuan suatu bangsa<sup>14</sup>.

### C. Menuju MI Unggulan

Dengan keluarnya SKB 3 Menteri tentang peningkatan mutu pendidikan madrasah, diperkuat dengan UU No. 2 tahun 1989 dan disempurnakan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kedudukan madrasah itu sudah kokoh dan mantap dalam rumpun pendidikan nasional. Dengan kata lain, secara politik sudah tidak ada lagi penghalang yang mengganggu upaya pengembangan madrasah. Yang masih sedikit tersisa barangkali adalah hambatan yang bersifat ideologis dan psikologis. Secara bertahap beban itu juga mulai memudar seiring semakin meningkatnya tarap berpikir umat.

Sangat disayangkan keterbukaan pemerintah untuk mengakomodasi keberadaan madrasah belum ditangkap sebagai sebuah peluang untuk mendongkrak kualitas madrasah. Harus diakui bahwa usaha meningkatkan kualitas madrasah, terutama Madrasah Ibtidaiyah bukan perkara mudah. Sebab, sebagian besar Madrasah Ibtidaiyah berada di lingkungan pedesaan, muridnya berasal dari keluarga tidak kaya, dan sebagian besar dikelola oleh yayasan/ lembaga swasta<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Sayidiman Suryohadiprojo, “Pendidikan Dasar yang Bermutu” dalam Ikhwanuddin Syarief & Dodo Murtadlo (ed.), *Pendidikan untuk Indonesia Baru 70 Tahun HAR Tilaar*. Jakarta: Grasindo, 2002) hal. 165-193.

<sup>15</sup> Zamakhsyari Dhofier, “Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia”, *Majalah Prisma* No. 2/Vol. XV (Februari 1986) hal. 22-28; Zakiyah Daradjat, “Pendidikan di Indonesia” *Majalah Mimbar Ulama* No. 24 Vol. III (Nopember 1978) hal. 19-25.

Kerumitan itu masih ditambah lagi dengan krisis guru yang dialami Madrasah Ibtidaiyah dalam satu dasawarsa terakhir ini. Dikatakan menderita krisis guru, karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa guru PNS yang diperbantukan (DPK) sudah memasuki pensiun masal sehingga tidak ada lagi guru PNS, walaupun ada hanya 1 orang biasanya merangkap sebagai kepala sekolah. Untuk menambal kekurangan, terpaksa merekrut guru bantu atau guru wiyata bakti yang latar belakang pendidikannya bukan berasal dari jalur pendidikan dan bergaji sangat minim, antara Rp.100.000 hingga Rp. 200.000. Melihat kondisi demikian, usaha memperluas kapasitas guru menjadi kunci utama membuka gerbang kemajuan Madrasah Ibtidaiyah. Lahirnya jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) di Fakultas Tarbiyah UIN/IAIN/STAIN dapat menjadi darah segar sebagai pemacu peningkatan kualitas guru Madrasah Ibtidaiyah.

Strategi Departemen Agama melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam dalam mengembangkan madrasah dilakukan melalui langkah-langkah berikut.

1. Peningkatan mutu semua jenis dan jenjang pendidikan pada perguruan agama Islam sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta tuntutan pembangunan.
2. Pembinaan madrasah negeri diusahakan untuk menjadi contoh (model) bagi madrasah swasta terutama dalam soal mutu.
3. Pembinaan madrasah swasta diarahkan agar sistem pendidikannya selaras dengan sistem pendidikan nasional. Mutunya sama dengan madrasah negeri<sup>16</sup>.

Pilihan strategi Depag dalam pengembangan madrasah itu mirip, atau bahkan sama dengan, yang dilakukan oleh Diknas melalui pembentukan pembentukan gugus-gugus sekolah dimana ada 1 sekolah yang berkewajiban membina sekolah imbas. Pola itu cocok untuk pengembangan SD di lingkungan Diknas, tetapi tidak untuk pengembangan MI. Mengapa strategi itu tidak tepat sasaran? *Pertama*, jumlah MIN yang menjadi rujukan atau model tidak banyak, satu kabupaten paling hanya 1 atau 2 madrasah sehingga sangat berat apabila harus membina MI lain yang berjumlah hingga 50-an untuk setiap kabupaten atau kota. *Kedua*, usaha peningkatan kualitas MI dengan jalan penegerian MI swasta jelas bukan langkah bijak. Hal itu justru

---

<sup>16</sup> Marwan Saridjo, *Bunga Rampai....* hal. 170-171.

mengebiri dan meremehkan potensi umat, apalagi ketika Depag harus dihadapkan dengan dana yang terbatas, berapa MI yang akan mampu dinegerikan dengan dana tersebut?. *Ketiga*, menempatkan MIN seolah-olah kualitasnya di atas MI swasta harus dilakukan secara hati-hati. Bukan tidak mungkin MI swasta justru lebih berkualitas tinimbang MIN, sebagaimana kasus gugus SD di lingkungan Diknas.

Kalau strategi Depag dalam mengembangkan MI dipandang kurang tepat, terus strategi apa yang lebih sesuai? Berangkat dari sejarah panjang pendidikan Islam di Indonesia yang merupakan milik masyarakat, atau istilah sekarang yayasan, maka strategi pengembangan madrasah, khususnya MI sebaiknya dilakukan dari bawah. Depag bertugas mendorong, menstimulasi, dan memfasilitasi umat agar tergerak hatinya ikut memikirkan pengembangan madrasah. Kata kuncinya adalah mengaktualkan potensi umat Islam sehingga memiliki greget untuk memajukan madrasah dan para pengelolanya harus didorong agar mampu berkreasi secara mandiri dengan cara menciptakan terobosan-terobosan baru.

Ketika membincang MI unggulan, secara otomatis jari telunjuk langsung diarahkan pada MIN Malang. Imron Arifin, sebagaimana disitir Arif Furchan, menyebut MIN Malang sebagai MI berprestasi yang memiliki 10 ciri yang melekat di lembaga tersebut. Kesepuluh karakter/ciri khas MIN Malang tersebut mencakup: (1) fasilitas fisik dan perlengkapan yang baik; (2) guru-guru dan staf pendukung yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi; (3) pembelajaran yang berdiferensiasi; (4) harapan dan kepercayaan yang tinggi, dan dukungan yang kuat dari orang tua dan masyarakat sekitar; (5) organisasi yang rasional dan harmonis; (6) komitmen yang tinggi terhadap budaya dan agama; (7) iklim kerja yang sehat serta motivasi dan semangat kerja yang tinggi; (8) keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-gurunya; (9) dukungan figure-figur kreatif yang kaya wawasan dan gagasan; dan (10) kepemimpinan kepala sekolah yang efektif<sup>17</sup>.

Profil MIN Malang merupakan lukisan MI yang sangat ideal dan sudah jadi. Bagi MIN mungkin bisa dijadikan cermin diri untuk melakukan perubahan, tetapi untuk MI swasta harus berpikir seribu kali bila ingin mencontoh atau menjadikan MIN Malang sebagai model pengembangan madrasah. Sebab, sebagai madrasah negeri gaji guru dan kebutuhan uga

---

<sup>17</sup> Arif Furchan . *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi keberadaan Madrasah dan PTAI* (Yogyakarta: Gama Media, 2004) hal. 99-100.

rampai lain sudah disiapkan pemerintah, sedangkan MI swasta harus mengusahakannya sendiri. Oleh karena itulah, selanjutnya akan dijelaskan bagaimana jalan terjal nan mendaki yang dilalui MI atau SD Islam swasta (Muhammadiyah) untuk mengembangkan dirinya sehingga bisa dipercaya oleh masyarakat.

#### **D. Bergumul dari Bawah: Sekelumit Catatan Kancah**

Cara perintisan dan penangan MI di perkotaan tentu saja berbeda dengan yang ada di lingkungan pedesaan. Contoh pengembangan madrasah perkotaan adalah MI Muhammadiyah Program Khusus (MIM PK) Kudus, sedangkan model pedesaan, karena sampai saat ini belum menemukan MI yang bisa dijadikan model, akan dicontohkan SD Muhammadiyah Tayu Pati. Catatan ini merupakan produk interaksi langsung dengan mereka. Proses interaksi antar SD dan MI Muhammadiyah amat intensif sejak tahun 2005, yaitu dengan terbentuknya Jaringan Sekolah [SD/MI] Muhammadiyah (JSM) wilayah DIY dan Jawa Tengah. JSM menjelma menjadi payung besar sekaligus penunjuk jalan bagi SD dan MI Muhammadiyah yang berkeinginan untuk maju secara berjamaah. Di situ ada SD/MI unggulan yang bersedia berbagi dan mencurahkan pikiran untuk memajukan pendidikan dasar.

Di mulai dengan pengembangan sekolah untuk wilayah perkotaan. Ciri masyarakat kota cenderung cair dan dinamis, serta lebih mudah menerima perubahan. MIM PK berdiri di atas puing-puing MIM 2 yang gulung tikar akibat ditinggalkan siswa. Mulai tahun 2005 muncul prakarsa dari Muhammadiyah setempat untuk mengembangkan MIM 2 menjadi *Fullday School*, dan dipilihlah SD Muhammadiyah PK Kottabarat Solo sebagai model sekaligus mitra. Ternyata, dalam waktu relatif singkat kepercayaan masyarakat dapat diraih kembali. Sekarang telah memasuki tahun ke-5, dengan kerja keras guru dan segenap warga Muhammadiyah, animo masyarakat untuk bersekolah di tempat itu terus meninggi. Pembiayaan madrasah berasal dari masyarakat, terutama orang tua siswa. Sebab yang bersekolah di situ sebagian besar dari keluarga kelas menengah dan menengah atas.

Berlainan dengan masyarakat kota yang memiliki kesadaran tinggi untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan berkualitas, meskipun dengan membayar biaya yang tidak sedikit, tidak demikian dengan kondisi masyarakat pedesaan. Kita sering mendengar ungkapan, "mau bersekolah saja sudah untung", sehingga tidak mungkin menarik uang dari mereka. Kondisi ini harus

disikapi secara bijak dan penuh kreativitas. Salah satu orang yang bisa melakukan itu adalah Suparwi, adik Prof. Amin Abdullah-rector UIN Yogya, kepala SD Muhammadiyah Tayu Pati.

Setelah merampungkan kuliah di Tarbiyah IAIN Yogya tahun 1991 dan Fakultas Ekonomi UII pada tahun 1992, Suparwi “dipaksa” pulang kampung oleh orang tuanya untuk membenahi SD Muhammadiyah di desanya yang tengah kolaps. Tahun 1995 ia diangkat sebagai kepala sekolah, yang pertamanya dilakukan bukannya menata administrasi ataupun meningkatkan kualitas guru, tetapi malah sibuk mencari-cari sumber pembiayaan alternatif untuk menopang sekolahnya. Alasannya logis, tidak mungkin bisa menarik uang yang memadai dari masyarakat. Melalui serangkaian lobi dan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan pengusaha ternyata usahanya menuai hasil. Ada tiga kolam tambak luas, dan berhasil menjadi distributor pupuk untuk wilayah Pati. Belakangan juga merintis kemitraan dengan Honda untuk menjadi dealer plus bengkel resminya.

Uang hasil usahanya itu digunakan untuk membiayai operasional sekolah dan gaji guru. Strategi Suparwi mengangkat SD dari sisi luar terbilang sukses. Ketika gaji guru berangsur naik, motivasi mengajar guru semakin berlipat sehingga kualitas sekolah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Secara bertahap masyarakat menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap SD Muhammadiyah Tayu. Pada bulan Agustus 2006 mengirimkan 3 orang guru untuk magang selama tiga di SD Muhammadiyah PK Kottabarat Solo. Ada pemikiran untuk mengembangkan SD Muhammadiyah Tayu menjadi *Fullday School* atau merintis sekolah baru<sup>18</sup>.

Potret rintisan pengembangan MI dan SD swasta di atas, bisa dijadikan titik masuk untuk mengembangkan MI yang sebagian besar swasta dan berada di wilayah pedesaan. Harus diakui bahwa usaha meningkatkan kualitas MI di desa jauh lebih rumit dibandingkan MI perkotaan. Oleh karena itu diperlukan kerja lebih keras dan cerdas ketika mengelola MI di pedesaan.

---

<sup>18</sup> Ketika Suparwi menyampaikan keinginan untuk mengembangkan sekolahnya, saya menyampaikan dua pertimbangan. Alternatif pertama, meningkatkan mutu sekolah dengan menggiatkan pelatihan guru dan menambah fasilitas belajar secara bertahap. Alternatif kedua, bila akan mengaplikasikan *fullday school* harus merintis sekolah baru yang tempatnya lebih dekat ke kota, atau paling tidak, mudah dijangkau masyarakat. Sebab, baik dari sisi ekonomi ataupun social-budaya masyarakat kota yang bercorak patembayan memang lebih membutuhkan *fullday school*, tinimbang anak-anak pedesaan yang masih kental dengan budaya paguyuban.

Sumber daya guru amat terbatas, situasi masyarakat relative miskin, ditambah kesadaran akan pentingnya pendidikan yang amat rendah. Tantangan untuk MI swasta di pedesaan begitu kompleks dan rumit. Pencarian sumber biaya alternatif dalam bentuk zakat, infak, shadaqah dan pengoptimalan tanah wakaf menjadi kata kunci untuk keluar dari lingkaran ini. Apa yang dikerjakan Suparwi, kepala SD Muhammadiyah Tayu Pati, bisa menjadi model bagi kita dalam meremajakan MI.

Pemupukan MI unggulan juga harus ditopang oleh pengajar yang ikhlas dan handal. Pengelola dan pendidik MI dituntut kesungguhannya dalam menerima amanah dari orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan benar. Karena anak hakikatnya adalah amanah Allah SWT, maka pengelola dan pendidik MI memiliki tanggung jawab moral dan keagamaan untuk menunaikan amanah itu dengan sepenuh jiwa dan raga. Menjadi guru bukan sekedar berwiyata bakti, untuk menunggu pengangkatan menjadi PNS, atau sekedar mengisi waktu luang tinimbang menganggur. Jika pengelola dan pendidik MI menghayati betul amanat itu, maka tidak ada jalan kecuali bekerja keras untuk memajukan MI. Kalau ada kemauan, pasti Allah menunjukkan jalan-Nya.

## Penutup

Uraian di muka menegaskan bahwa sebagian besar MI swasta yang berada di pedesaan tengah tertidur pulas. Meskipun ada riak-riak kecil perubahan. itu hanya terjadi di permukaan dan dalam jumlah yang sangat terbatas sehingga belum mampu membangunkannya. Diperlukan ombak dan gelombang besar untuk membangunkan tidur pulasnya tersebut. Gelombang besar akan muncul bila ada angin kencang yang mendorongnya. Hadirnya jurusan PGSD dan PGMI belakangan ini bisa menjadi kekuatan inti untuk menggerakkan kemajuan MI. Hal itu bisa terjadi manakala sistem perkuliahan mampu membekali calon guru SD/MI memiliki kemampuan teoritis sekaligus praktis secara memadai. Tanpa kemampuan itu, pembukaan jurusan baru tersebut kurang bermakna dalam pengembangan MI.

Harapan pemupukan MI unggulan banyak dialamatkan kepada lulusan PGMI dan PGSD sebagai tenaga pendidik profesional, mandiri, dan kompeten. Pengembangan jejaring (*networking*), seperti JSM, juga menjadi pupuk organik yang mampu menumbuh-suburkan MI. Belajar dengan teman sederajat memungkinkan keterbukaan dan kemudahan komunikasi. MI

unggulan bisa menjadi pelopor bagi MI dan MI lain berperan sebagai pemantap pengembangan. Dengan cara demikian, maka seluruh MI dapat bergerak maju menyongsong masa depan yang lebih cerah.

Sebagaimana telah disinggung di muka, sebagian MI adalah milik masyarakat di bawah payung yayasan atau organisasi keagamaan. Tangan yayasan dan organisasi keagamaan harus bergerak dan turun tangan mengatasi hambatan yang muncul di lapangan. Terutama terkait dengan masalah pendanaan dan penyediaan fasilitas belajar sehingga MI benar-benar layak dan memadai sebagai tempat belajar yang ramah bagi anak-anak bangsa.

Apabila tiga pupuk MI berperan optimal, maka pertumbuhan MI semakin cepat dan bisa benar-benar berproses menjadi MI unggulan. Ketiga pupuk tersebut adalah ketersediaan guru professional-mandiri-kompeten, jejering antara sekolah yang kokoh dan dinamis, dan peran aktif yayasan ataupun organisasi keagamaan yang menaunginya. Keunggulan MI menjadi kata kunci untuk memainkan sekali lagi kepeloporannya dalam derap pendidikan nasional sebagaimana yang dilakukan pada awal abad ke-20 melalui gerakan modernisasi pendidikan Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Malik Fadjar (1998) *Madrasah dan Tantangan Modernitas* Bandung: Mizan
- Arif Furchan (2004). *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia: Anatomi keberadaan Madrasah dan PTAI*. Yogyakarta: Gama Media
- Azyumardi Azra (1999). "The Rise of Muslim Elite School: A New Patern of Santrinization in Indonesia" *Al-Jamiah Journal of Islamic Studies* Vol.XII/ No. 64.
- Abdul Munir Mulkhan (1993). *Paradigama Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan dan Dakwah*. Yogyakarta: Sipress.
- Husni Rahim (2001) *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Logos.
- Jajat Burhanudin & Dina Afrianty [ed.]. (2006). *Mencetak Muslim Modern: Peta Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maksum (1999). *Madrasah Sejarah & Perkembangannya*. Jakarta: Logos
- Marwan Saridjo (1986). *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Depag.
- Mohamad Ali (2009). *Menabur Benih Sekolah Unggul di Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Muhammad Sirozi (2004). *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. Leiden-Jakarta: INIS.
- Peacock, James L. (1983). *Pembaharu dan Pembaharuan Agama*. Yogyakarta: Hanindita.
- Sahal Mahfudh (2007). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Saifuddin Zuhri (2007). *Guruku Orang-orang dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.
- Sayidiman Suryohadiprojo (2002), "Pendidikan Dasar yang Bermutu" dalam Ikhwanuddin Syarief & Dodo Murtadlo (ed.), *Pendidikan untuk Indonesia Baru 70 Tahun HAR Tilaar*. Jakarta: Grasindo
- Steenbrink, Karel A. (1984). *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*. Jakarta: Bulan Bintang.
- (1994). *Pesantren Madrasah Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES.
- Zakiyah Daradjat (1978). "Pendidikan di Indonesia" *Majalah Mimbar Ulama*. No. 24 /III
- Zamkhsyari Dhofier (1993). "Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Pendidikan Nasional" *Majalah Prisma* No. 9/XII

- (1986). “Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia”, *Majalah Prisma* No. 2/XV.
- (1992). “Sekolah al-Quran dan Pendidikan Islam di Indonesia”, *Jurnal Ulumul Quran*. No. 4/III.
- Majalah Triwulan *Madinah* (No. 07/1/Juli 2008).